



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH, SERTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pegawai yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SERTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
5. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.

6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
9. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
10. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.

12. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
13. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
14. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan di bawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

**BAB III
HASIL ANALISIS JABATAN**

Pasal 3

Hasil Analisis Jabatan berupa Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

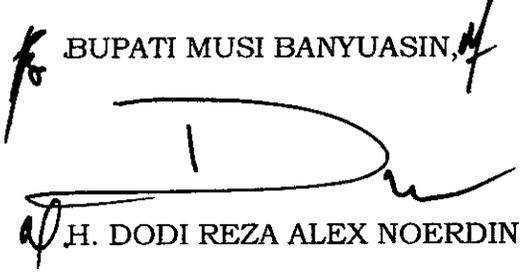
**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

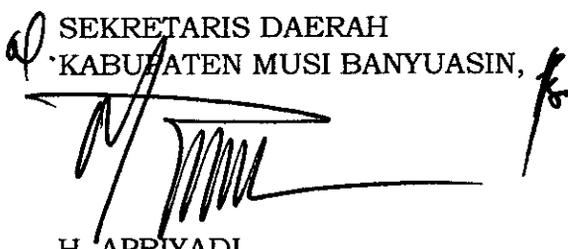
Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 79 Tahun 2018

Tanggal : 9 AGUSTUS 2018

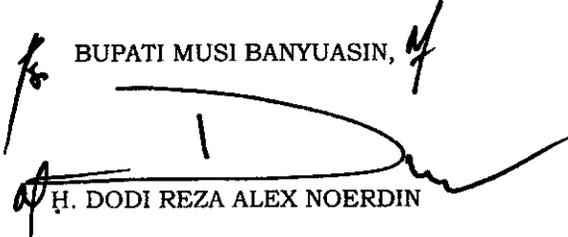
Tentang : Hasil Analisis Jabatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama Unit Kerja	Nama Jabatan	
A	Bupati dan Wakil Bupati		
		Bupati	
		Wakil Bupati	
B	Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin		
		Sekretaris Daerah	
	I. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra		
		Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
	1. Bagian Tata Pemerintahan		
		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
	a. Sub Bagian Tata Pemerintahan		
		Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan	
		Pengadministrasi umum	
		Pengelola Data	
		Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	
	b. Sub Bagian Perangkat Daerah		
		Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah	
		Pengadministrasi umum	
		Analisis Pengembangan Wilayah	
		Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	
	c. Sub Bagian Pengembangan Wilayah		
		Kepala Sub Bagian Pengembangan Wilayah	
		Analisis Pemerintahan Daerah	
		Analisis Pengembangan Wilayah	
		Pengelola Data	
		Bendahara Pembantu	
	2. Bagian Protokol		
		Kepala Bagian Protokol	
	a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan		
		Kepala Sub Bagian Tata Usahan Pimpinan	
		Pengadministrasi umum	
		Pramu Tamu	
		Penata Usaha Pimpinan	
		Bendahara	
		Pengemudi	
		Pengelola Barang Milik Negara	
	b. Sub Bagian Pelayanan Keprotokolan		
		Kepala Sub Bagian Pelayanan Keprotokola	
		Petugas Sarana dan Prasarana Keprotokolan	
		Pengelola Keprotokolan	
		Koordinator Keprotokolan	
	c. Sub Bagian Acara dan Upacara		
		Kepala Sub Bagian Acara dan Upacara	
		Pranata Acara dan Upacara	
		Koordinator Lapangan	
		Pengelola Data	
	3. Bagian Kesejahteraan Rakyat		
		Kepala Bagian Kesra	
a. Sub Bagian Kesejahteraan			
	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan		
	Bendahara Pembantu		
	Analisis Kesejahteraan Rakyat		
	Penyusun Pemberdayaan Amil Zakat		
b. Sub Bagian Keagamaan			
	Kepala Sub Bagian Keagamaan		
	Pengelola Data Keagamaan dan Pendidikan		
	Pengelola Jemaah Haji		
	Pengelola Bantuan Keagamaan		
	Analisis Bina Kehidupan Agama		

c. Sub Bagian Sosial Budaya
Kepala Sub Bagian Sosial Budaya
Operator Komputer
Penyuluh Bimbingan Mental
Pengadministrasi Umum
4. Bagian Penyelesaian Perbatasan
Kepala Bagian Penyelesaian Perbatasan
a. Sub Bagian Penyelesaian Batas
Kepala Sub Bagian Penyelesaian Batas
Analisis Kerjasama
Pengadministrasi Umum
Analisis Batas Wilayah
Pengelola Data
Bendahara Pembantu
b. Sub Bagian Fisik dan Prasarana
Kepala Sub Bagian Fisik dan Prasarana
Pengelola Data
Petugas Pembuat Batas Wilayah
Pengadministrasi Umum
c. Sub Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan
Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Pemeliharaan
Pengadministrasi Umum
Pengawas Status Peta Wilayah
Pengelola Data
II. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan
Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan
Pengadministrasi umum
Pengelola Data
Bendahara Pembantu
b. Sub Bagian Administrasi Perekonomian
Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian
Pengelola Data
Analisis Perencanaan
Pengadministrasi umum
Analisis Ekonomi
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Energi dan Perusahaan
Kepala Sub Bagian SDA, Energi dan Perusahaan
Pengadministrasi umum
Operator Komputer
Pengelola Data
2. Bagian Umum dan Pengadaan
Kepala Bagian Umum dan Pengadaan
a. Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pengadministrasi umum
Bendahara Pembantu
Pengemudi
Pramu Bakti
Pramu Tamu
Analisis Kepegawaian
Caraka
Pengelola Data
Pengelola Keuangan
Verifikator Keuangan
Arsiparis
b. Sub Bagian Analisis Kebutuhan, Perlengkapan dan Aset
Kepala Sub Bagian Analisis Kebutuhan, Perlengkapan dan Aset
Pengelola Data
Pengelola Barang Milik Negara
Analisis Perencanaan
Pemelihara Sarana dan Prasarana
Koordinator Gudang
Penata Kendaraan Dinas
Pemelihara Barang
Pengelola Kendaraan Dinas
Pengadministrasi umum
Penyimpan Barang

c. Sub Bagian Rumah Tangga
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Pengadministrasi umum dan Perlengkapan
Pengatur Rumah Tangga
Pemelihara Rumah Tangga
Pengelola Data
Pengawas Kebersihan
Pengelola Wisma
3. Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi
Kepala Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi
a. Sub Bagian Pelayanan Data
Kepala Sub Bagian Pelayanan Data
Pengadministrasi umum
Bendahara Pembantu
Pengelola Data
Programmer Komputer
b. Sub Bagian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Pengelola Data
Pengadministrasi Umum
Programmer Komputer
c. Sub Bagian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepala Sub Bagian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pengadministrasi Umum
Pengelola Data
Teknisi Informasi dan Komunikasi
4. Bagian Layanan Pengadaan
Kepala Bagian Layanan Pengadaan
a. Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi
Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi
Bendahara Pembantu
Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Kepegawaian
Analisis Perencanaan
Pengadministrasi Keuangan
b. Sub Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Kepala Sub Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Pengelola Data Sengketa
Pengadministrasi Pelelangan
c. Sub Bagian Pelelangan
Kepala Sub Bagian Pelelangan
Arsiparis
Pengadministrasi Pelelangan
Pengelola Data
Fungsional Barang dan Jasa
Fungsional Ahli Muda
III. Asisten Bidang Administrasi Umum
Asisten Bidang Administrasi Umum
1. Bagian Hukum
Kepala Bagian Hukum
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Pengadministrasi Umum
Analisis Hukum
Pengkajian dan Penelaah Hukum
b. Sub Bagian Bantuan Hukum
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Pengelola Bantuan Hukum
Penyusun Bantuan Hukum
Pengelola Data
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
Bendahara
Arsiparis Pelaksana
Pengadministrasi Umum

2. Bagian Organisasi
Kepala Bagian Organisasi
a. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja
Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan Beban Kerja
Analisis Jabatan
Pengelola Data
Pengadministrasi Umum
b. Sub Bagian Kelembagaan
Kepala Sub Bagian Kelembagaan
Pengelola Data Kelembagaan
Analisis Kelembagaan
Pengadministrasi Umum
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Pengadministrasi Umum
Analisis Ketatalaksanaan
Bendahara
Analisis Kepegawaian
3. Bagian Keuangan
Kepala Bagian Keuangan
a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
Pengadministrasi Keuangan
Pengelola Data
Analisis Perencanaan
Pengadministrasi Umum
b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
Bendahara Induk Setda
Verifikator Keuangan
Pengelola Data Keuangan
c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Pengelola Data Keuangan
Pengadministrasi Umum
Verifikator Keuangan
4. Bagian Hubungan Masyarakat
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
a. Sub Bagian Kebijakan Publik
Kepala Sub Bagian Kebijakan Publik
Pengadministrasi Keuangan
Pengelola Data
Bendahara Pembantu
Pengelola Penerjemah dan Kerjasama
b. Sub Bagian Informasi Publik
Kepala Sub Bagian Informasi Publik
Pengelola Data
Petugas Humas
Pengelola Bahan Publikasi dan Informasi
c. Sub Bagian Hubungan Publik
Kepala Sub Bagian Hubungan Publik
Pengadministrasi Umum
Pengelola Data
Analisis Humas Protokol
Petugas Humas



 BUPATI MUSI BANYUASIN,

 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

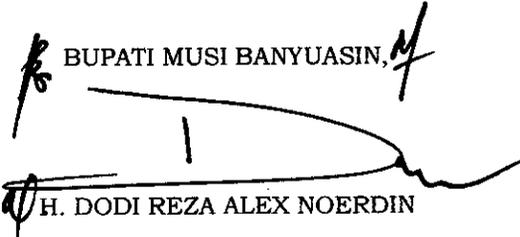
Nomor : 79 Tahun 2018

Tanggal : 9 AGUSTUS 2018

Tentang : Hasil Analisis Jabatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama Unit Kerja	Nama Jabatan
A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Kepala BPKAD
	I. Sekretariat	
		Sekretaris
	a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Analisis Program dan Perencanaan
		Pengelola Program dan Laporan
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
		Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		Analisis Kepegawaian
		Pengadministrasi Umum
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset	
		Kasubbag. Keuangan dan Aset
		Pengadministrasi Keuangan
		Pengelola Barang Milik Negara
		Bendahara Induk
	II. Bidang Anggaran	
		Kepala Bidang Anggaran
	a. Sub Bidang Anggaran I	
		Kepala Sub Bidang Anggaran I
		Pengelola data penganggaran
		Penyusun Anggaran
		Analisis Informasi Pelaksanaan Anggaran
	b. Sub Bidang Bagian Anggaran II	
		Kepala Sub Bidang Bagian Anggaran II
		Pengelola Data Penganggaran
		Penyusun Anggaran
		Analisis Informasi Pelaksanaan Anggaran
	c. Sub Bidang Bagian Anggaran III	
		Kepala Sub Bidang Bagian Anggaran III
		Pengelola Data Penganggaran
		Penyusun Anggaran
		Analisis Informasi Pelaksanaan Anggaran
		Bendahara Pembantu
	III. Bidang Perbendaharaan	
		Kepala Bidang Perbendaharaan
	a. Sub Bidang Perbendaharaan I	
		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
		Pengadministrasi Keuangan
		Pengelola Data Keuangan Daerah
		Pengelola Data Sistem Informasi Perbendaharaan
		Analisis Laporan Keuangan
	b. Sub Bidang Perbendaharaan II	
		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
		Pengadministrasi Keuangan
		Pengelola Data Keuangan Daerah
		Pengelola Data Sistem Informasi Perbendaharaan
	Analisis Laporan Keuangan	
c. Sub Bidang Perbendaharaan III		
	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III	
	Pengadministrasi Keuangan	
	Pengelola Data Sistem Keuangan Daerah	
	Pengelola Data Sistem Informasi Perbendaharaan	
	Analisis Laporan Keuangan	
	Bendahara Pembantu	

IV. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
a. Sub Bidang Pengelolaan Aset I
Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Pengelola Data Kebijakan Klasifikasi Barang dan Aset
Analisa Kebijakan Klasifikasi Barang dan Aset
b. Sub Bidang Pengelolaan Aset II
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset II
Penaksir Aset Daerah
Pengelola Data Kebijakan Klasifikasi Barang dan Aset
Pengelola Data Distribusi dan Penghapusan Barang
c. Sub Bidang Pengelolaan Aset III
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset III
Pengelola Data Distribusi dan Penghapusan Barang
Pengadministrasi Barang
Bendahara Pembantu
V. Bidang Akuntansi
Kepala Bidang Akuntansi
a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
Pengelola akuntansi
b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
Analisis Laporan Keuangan
Pengelola Data Sistem Akuntansi
Pengelola Akuntansi
c. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
Analisis Keuangan
Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan
Pengelola Akuntansi
Pengelola Data Laporan Kas



 BUPATI MUSI BANYUASIN,

 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

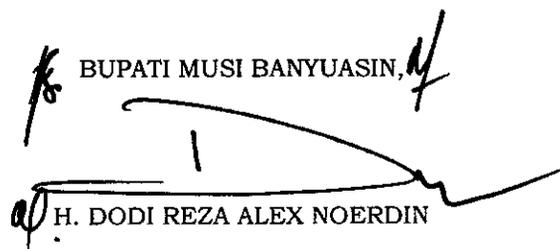
Nomor : 79 Tahun 2018

Tanggal : 9 AGUSTUS 2018

Tentang : Hasil Analisis Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama Unit Kerja	Nama Jabatan
A	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
		Kepala BAPPEDA
	I. Sekretariat	
		Sekretaris
	a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Analisis Program dan Perencanaan
		Pengelola Program dan Laporan
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
		Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		Analisis Kepegawaian
		Pengadministrasian Umum
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset	
		Kasubbag. Keuangan dan Aset
		Pengadministrasian Keuangan
		Pengelola Barang Milik Negara
		Bendahara
	II. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
		Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	a. Sub Bidang Sumber Daya Alam	
		Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
		Pengelola Perencanaan dan Pengembangan
		Analisis Pengembangan Potensi Daerah
		Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA
	b. Sub Bidang Ekonomi	
		Kepala Sub Bidang Ekonomi
		Analisis Ekonomi
		Analisis Perencanaan dan Program
		Pengelola Program dan Kegiatan
		Bendahara Pembantu
	c. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan	
		Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan
		Analisis Pembangunan
		Pengelola Perencanaan dan Pengembangan
	III. Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	
		Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia
	a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik	
		Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik
		Penyusun Bahan Pelaporan
		Analisis Kemitraan
		Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah
	b. Sub Bidang Kessos dan Kesra	
		Kepala Sub Bidang Kessos dan Kesra
		Pengelola Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan
		Bendahara Pembantu
	c. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	
		Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
		Analisis Kemitraan
		Pengadministrasian Pendidikan dan Kebudayaan
	IV. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
a. Sub Bidang Infrastruktur		
	Kepala Sub Bidang Infrastruktur	
	Analisis Perencanaan dan Program	
	Analisis Pengelola Program dan Kegiatan	
	Bendahara Pembantu	

b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Analisis Pengembangan Wilayah
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan
c. Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Analisis Perencanaan Pemukiman dan Lingkungan
Pengelola Data Pengendalian Pembangunan
Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan
V. Bidang Program, Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Kepala Bidang Program, Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
a. Sub Bidang Program dan Anggaran Pembangunan
Kepala Sub Bidang Program dan Anggaran Pembangunan
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Pengelola Data Pengendalian Pembangunan
Bendahara Pembantu
b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan
Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan
Pengolah Data Pengendalian Pembangunan
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Analisis Pembangunan
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Pengelola Rencana dan Evaluasi Program
Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Pengumpul Bahan Perencanaan
VI. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
a. Sub Bidang Data dan Informasi
Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
Pengelola Program dan Kegiatan
Pengelola Data dan Informasi
Bendahara Pembantu
b. Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya
Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya
Analisis Hasil Penelitian
Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian
c. Sub Bidang Pengkajian SDA, Perhubungan, Teknologi dan Inovasi
Kepala Sub Bidang Pengkajian SDA, Perhubungan, Teknologi dan Inovasi
Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian
Pengelola Program dan Kegiatan
Analisis Hasil Penelitian



 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

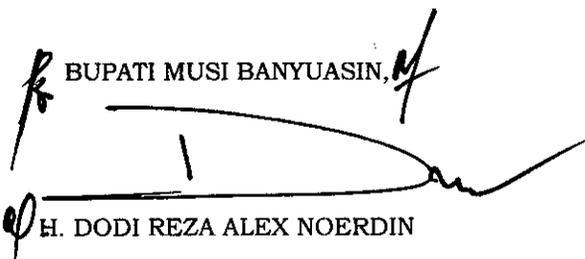
Nomor : 79 Tahun 2018

Tanggal : 9 AGUSTUS 2018

Tentang : Hasil Analisis Jabatan Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama Unit Kerja	Nama Jabatan
A	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala BKPSDM
	I. Sekretariat	Sekretaris
	a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Analisis Program dan Perencanaan
		Pengelola Program dan Laporan
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
		Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
		Analisis Kepegawaian
		Pengadministrasi Umum
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset	Kasubbag. Keuangan dan Aset
		Pengadministrasi Keuangan
		Pengelola Barang Milik Negara
		Bendahara Induk
	II. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
	a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
		Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
		Pengelola Disiplin Pegawai
		Pengadministrasi ASN Non PNS
		Analisis Kepegawaian
	b. Sub Bidang Data dan Informasi	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
		Pengelola Teknologi Informasi Komputer
		Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian
		Pengelola Situs/Web
		Arsiparis
	c. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
		Pengadministrasi Umum
		Pengelola Profesi SDM
		Bendahara Pembantu
	III. Bidang Mutasi dan Promosi	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
	a. Sub Bidang Mutasi	Kepala Sub Bidang Mutasi
		Analisis Kepegawaian
		Penyusun Rencana Mutasi
		Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian
	b. Sub Bidang Kepangkatan	Kepala Sub Bidang Kepangkatan
		Pengadministrasi SK Kenaikan Pangkat
		Analisis Kepegawaian
		Bendahara Pembantu
	c. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
		Analisis Pengembangan Karir dan Promosi
		Pengelola Mutasi dan Promosi

IV. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
a. Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi
Kepala Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi
Analisis Program Diklat
Pengelola Penyelenggaraan Diklat
Pengadministrasi Tugas Belajar
b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
Analisis Program Diklat
Pengelola Penyelenggaraan Diklat
Penyusun Laporan Hasil Diklat
c. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
Pengadministrasi Umum
Analisis Pengembangan Kompetensi
Pengelola Pelaksanaan Seleksi Jabatan
Bendahara Pembantu
V. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai
Pengadministrasi Umum
Analisis Kinerja
b. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
Pengelola Penilaian Kinerja
Pengadministrasi Umum
Analisis Kinerja
c. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
Pengadministrasi Umum
Pengelola Disiplin Pegawai
Analisis Kepegawaian
Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur



 BUPATI MUSI BANYUASIN,

 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

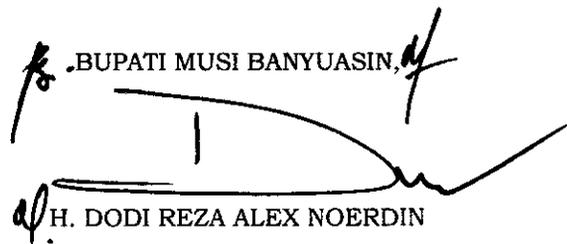
Nomor : 79 Tahun 2018

Tanggal : 9 AGUSTUS 2018

Tentang : Hasil Analisis Jabatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kabupaten Musi Banyuasin

No	Nama Unit Kerja	Nama Jabatan
A	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Kepala DPTMPTSP	
	I. Sekretariat	
	Sekretaris	
	a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
	Analisis Program dan Perencanaan	
	Pengelola Program dan Laporan	
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
	Pengadministrasi Kepegawaian	
	Pengadministrasi Umum	
	c. Sub Bagian Keuangan dan Aset	
	Kasubbag. Keuangan dan Aset	
	Pengadministrasi Keuangan	
	Pengelola Barang Milik Negara	
	Bendahara Induk	
	II. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
	a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal	
	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	
	Analisis Penanaman Modal	
	Pengadministrasi Akses Penanaman Modal	
	Analisis Perizinan	
	Bendahara Pembantu	
	b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	
	Pengelola bahan Perencanaan	
	Pengelola Data Pengembangan Investasi	
	c. Seksi Promosi Penanaman Modal	
	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	
	Analisis Pengembangan Pasar Modal	
	Penyiap Bahan Pembinaan dan Promosi	
	Pengelola Data Informasi, Publikasi dan Penyuluhan	
	III. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	
	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	
	a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Pengawas Penanaman Modal	
Pengelola Perizinan		
Pengelola Data Investasi		
Bendahara Pembantu		
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		
Pengelola Pembinaan dan Penanaman Modal		
Analisis Perizinan		
Pengelola Dokumen Perizinan		
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi		
Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal		
Pengumpul dan Pengelola Data Investasi		
Analisis Usaha dan Kerjasama		
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu		

IV. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan
Pengelola Perizinan
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Analisis Perizinan
Juru Gambar
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan
Pengelola Perizinan
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Analisis Perizinan
Juru Gambar
c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat
Pengelola Perizinan
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Analisis Perizinan
Juru Gambar
Bendahara Pembantu
V. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
Pengelola Data
Analisis Data dan Informasi
Analisis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
Bendahara Pembantu
b. Seksi Kebijakan dan Penyuluh Layanan
Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluh Layanan
Pengolah Data Informasi, Publikasi dan Penyuluhan
Analisis Pengusahaan dan Pelayanan
Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor
c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
Pengelola Program dan Pelaporan
Pengelola Data
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu



 H. DODI REZA ALEX NOERDIN